

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan dari hasil kajian Perlindungan Hukum Warga Negara (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri). Dari data dan fakta yang ada, peneliti memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun simpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai berikut:

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Sesuai dengan hasil deskripsi penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum warga negara melalui implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri telah dilaksanakan dengan cukup baik. Perda tersebut dibuat dengan tujuan agar meningkatkan perlindungan hukum bagi TKI di Kabupaten Cianjur sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang akan timbul. Namun, pada pelaksanaannya memang masih terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan implementasi Perda tersebut, sehingga dibutuhkan koordinasi antar instansi/lembaga untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan bagi TKI di Kabupaten Cianjur.

##### **5.1.2 Simpulan Khusus**

Setelah melakukan analisis yang mendalam, maka peneliti memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Simpulan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan yang menimpa TKI asal Cianjur di luar negeri disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terdiri dari *pertama*, kemampuan berbahasa asing/ komunikasi; *kedua*, kemampuan adaptasi; *ketiga*, keterampilan kerja. Ketiga faktor tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan calon TKI. Selain

faktor internal ada juga faktor eksternal yaitu proses perekrutan yang masih belum sesuai aturan dan kurangnya koordinasi antar lembaga dalam mencegah pemberangkatan TKI ilegal. Proses perekrutan TKI di Cianjur lebih mengutamakan kuantitas dan uji kompetensi seadanya sehingga tidak jarang menghasilkan TKI dengan tingkat kecakapan yang rendah. Ditambah proses pemberangkatan yang tidak terkontrol/terawasi, pemalsuan identitas TKI, ketidaktahuan TKI terhadap hak dan kewajibannya menambah panjang permasalahan yang timbul.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur antara lain: *pertama*, sosialisasi mengenai penempatan dan perlindungan TKI; *kedua*, melaksanakan pelatihan kerja bagi calon TKI; *ketiga*, membuat kebijakan mengenai perlindungan TKI; *keempat*, meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain terkait pengawasan TKI; *kelima*, memberikan bantuan hukum kepada TKI yang bermasalah. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat khususnya bagi TKI.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur antara lain: *pertama*, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait penempatan dan perlindungan TKI; *kedua*, masih banyak PPTKIS yang belum membuka kantor cabang atau cabang pembantu yang berkedudukan di Kabupaten Cianjur; *ketiga*, kurangnya koordinasi antar lembaga dalam mencegah pemberangkatan TKI ilegal ke luar negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan TKI di Kabupaten Cianjur memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat.
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam upaya penanggulangan permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur, antara lain : *pertama*, mengoptimalkan sosialisasi secara berkala terkait penempatan dan perlindungan TKI, dan membentuk wadah informasi terkait pengaduan permasalahan TKI baik secara langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur maupun secara *online* yang dapat diakses oleh

**Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

semua masyarakat luas tanpa terbatas jarak; *kedua*, membentuk kebijakan yang tegas terkait PPTKIS agar membuka kantor cabang atau cabang pembantu yang berkedudukan di Cianjur agar pemerintah dapat mudah memonitoring keberangkatan para TKI asal Cianjur ke luar negeri dan mencegah perekrutan yang non-prosedural.

## 5.2 Implikasi

Penelitian tentang perlindungan hukum warga negara melalui implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI asal Cianjur ke luar negeri adalah suatu cara agar masyarakat dan pemerintah lebih mengenal peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di masyarakat namun terasa dikesampingkan. Upaya-upaya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak pernah terjadi lagi kasus kekerasan yang menimpa TKI asal Cianjur di luar negeri dan meminimalisir permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur. Selain itu, dengan adanya penelitian ini pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur merasa kinerjanya dievaluasi secara langsung oleh masyarakat melalui penulis.

## 5.3 Rekomendasi

Peneliti menemukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan Perlindungan Hukum Warga Negara (studi kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI asal Cianjur ke luar negeri). Adapun beberapa hal yang menjadi rekomendasi yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kajian keilmuan khususnya ranah hukum dan kebijakan publik khususnya mengenai perlindungan hukum warga negara dan implementasi peraturan daerah.
- b. Hendaknya dapat memperbanyak kajian pemahaman mengenai perlindungan hukum warga negara yang dapat dijadikan sebagai pembentuk karakter warga negara. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur

- a. Hendaknya membangun kerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi publik tentang persyaratan, tata cara, tempat pendaftaran, biaya penempatan TKI dan bahaya *trafficking*.
- b. Hendaknya pemerintah menyisipkan materi PKn dalam pelatihan/ pendidikan yang diberikan kepada TKI sebelum berangkat ke negara tujuan agar dapat menambah wawasan TKI seputas hukum dan hak serta kewajibannya.
- c. Hendaknya pemerintah mencegah pemberangkatan TKI ilegal dengan cara meningkatkan pendidikan masyarakat dengan merealisasikan kerjasama antara Disnakertrans dan Dispendikbud untuk kejar paket B dan program pendidikan keterampilan hidup (*lifeskill*) secara gratis kepada pengangguran dan para calon TKI.

## 3. Bagi PT. Akbal Putra Mandiri

- a. Hendaknya melakukan promosi dan memberikan informasi yang seimbang dan benar kepada masyarakat atau calon TKI.
- b. Melaksanakan pelatihan dan menjaga kualitas pelatihan sesuai ketentuan dan kebutuhan negara tujuan.
- c. Hendaknya menyisipkan materi PKn dalam pelatihan/pendidikan agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
- d. Memberikan pelayanan secara bermartabat dengan sikap dan perilaku yang menghargai hak asasi manusia.

## 4. Bagi Masyarakat

- a. Hendaknya masyarakat khususnya Calon TKI mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Kabupaten Cianjur.
- b. Hendaknya masyarakat mencari tahu, mempelajari, memahami dan bertanya mengenai prosedur pendaftaran, persyaratan, hak dan kewajiban TKI di negara tujuan, aturan-aturan ketika menjadi TKI dan hal lainnya yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI.

Dinita Apringtyas Fahmi, 2019

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Hendaknya peneliti lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat ikut mengawal proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Meneliti dan menganalisis lebih dalam terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

**Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019**

***PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)***

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)